

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Problematik

Dewasa ini problematika lumpur belum juga menemui titik temu perubahan. Wilayah terdampak lumpur dalam radius beberapa kilometer pun harus menyingkir karena volume yang semakin banyak, dan diberikan ganti rugi atas pembangunan. Penyingkiran-penyingkiran pun dilakukan di Desa Gedang Porong, Desa Siring, Desa Ketapang dan beberapa desa lain di sekitarnya. Gejala masyarakat semakin muncul ke permukaan seolah hanyut dalam siklus *survival of the fittest*. Mereka yang tidak siap dengan perubahan ini mengalami guncangan yang begitu hebat.

Beberapa dari mereka mencoba bangkit dengan menjadi pedagang asongan di kerumunan kendaraan di Jalan Raya Surabaya-Malang yang kerap kali padat, atau menjadi tukang ojek dan pemandu wisata di tanggul lumpur lapindo, dan sebuah kenyataan pahit ketika perempuan-perempuan mereka menjajakan dirinya dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa diantara anak-anak mereka harus menghadapi jauhnya akses pendidikannya. Atau bagaimana gangguan kesehatan harus mereka hadapi.

Pemandangan pilu itu memang tidak tampak "sementara" memenuhi rongga kehidupan baru masyarakat Porong semenjak diturunkannya ganti rugi untuk merekonstruksi kehidupan mereka. Akan tetapi kenyataan bahwa lumpur itu

tidak akan berhenti hingga 10 tahun kedepan akan membangun peradaban baru penuh kepanikan. Sebuah implementasi buruk ketika pemerintah dan masyarakat membangun persepsi bahwa "tidak ada api jika tidak ada asap" bukan "bagaimana bersikap dengan api".

Luapan lumpur lapindo juga berdampak secara langsung terhadap aktifitas masyarakat di sekitar semburan lumpur. Debit luapan lumpur yang cenderung mengalami peningkatan berakibat pada terendamnya beberapa desa atau kelurahan di sekitar semburan. Beberapa wilayah yang terendam, yaitu Desa Renokenongo, Desa Jatirejo, Desa Siring Kecamatan Porong, dan Desa Kedungbendo. Kemudian secara bertahap luapan lumpur terus menerjang ke wilayah Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (perumtas) 1, Desa Mindi Kecamatan Porong, Desa Besuki, Desa Kedungcangkring dan Desa Pajarakan Kecamatan Jabon, serta pada akhirnya diperkirakan akan mengancam seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo dan daerah di sekitarnya.

Mengarah pada fakta tersebutlah, dapat disimpulkan bahwa wilayah-wilayah di sekitar Sidoarjo ini merupakan wilayah-wilayah yang rawan bencana. Jika tidak dilakukan upaya pencegahan atau bagaimana bersikap ketika mengalami guncangan bencana selanjutnya, maka korban fisik maupun psikis akan semakin banyak.

Bencana lumpur lapindo memang sudah berlangsung sejak delapan tahun yang lalu. Namun puing-puing yang tersisa menjadi cerita panjang yang tidak berujung. Persoalan gangguan alam, dampak fisik dan sosialpun saling ambil bagian memenuhi ruang kehidupan masyarakat yang pelik dan dilematis.

Bagaimana tidak setiap harinya, lumpur masih terus menyembur hingga mencapai 150.000 liter kubik¹. Akibatnya tanah di sekitarnya dapat dimungkinkan untuk ambles dan memunculkan semburan baru di daerah-daerah sekitar lumpur. Selain itu tanggul penahan lumpur semakin meninggi dan akan berakibat fatal jika hujan terus menerus turun. Persoalan kesehatan pun menjadi masalah yang rentan dimana ditemukan bahwa dalam kandungan asap lumpur mengandung senyawa zat Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH), senyawa organik yang berbahaya dan karsinogenik yang disinyalir sebagai penyebab kanker. Belum lagi lumpur yang dibuang ke Kali Porong, biota yang ada di sana juga akan tercemar dan mati. Itu memperparah kerusakan ekologi. Sampai saat ini belum dipastikan kapan semburan lumpur Lapindo ini akan berhenti atau bisa dihentikan. Bisa jadi semburan lumpur Lapindo ini akan berlangsung puluhan tahun. Maka selama itu pula logam berat dan PAH yang sangat berbahaya bagi manusia yang berasal dari perut bumi akan terus dikeluarkan.

Gejolak yang terjadi yang meliputi kehidupan korban lumpur lapindo salah satunya adalah munculnya rentenirisasi sebagai bagian “penyelamatan” ekonomi pasca tenggelamnya mata pencaharian mereka, hal ini disinyalir karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola ganti rugi dimana mayoritas dari korban lumpur itu memilih untuk membeli kebutuhan konsumtif ketimbang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi lingkungan baru. Di samping itu munculnya persoalan yang melibatkan anak-anak di Desa Ketapang Tanggulangin menjadi fokus kajian utama peneliti karena dinilai sangat rentan,

¹ Sumber data WALHI 2006

yakni munculnya pekerja anak, kenakalan remaja, perdagangan anak hingga pada persoalan pendidikan di masa-masa transisi sekolah yang harus dipindahkan.

Kegiatan pengurangan risiko bencana yang dimandatkan oleh Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana harus terintegrasi ke dalam program pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan. Ditegaskan pula dalam undang-undang tersebut bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor penentu dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

Pendidikan ini dinilai penting karena memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat korban lumpur lapindo. Pendidikan dapat dijadikan langkah strategis dalam menyelesaikan akar masalah dalam bencana. Pendidikan tanggap bencana merupakan sebuah gagasan yang kini menjadi model pemberdayaan bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak bencana. Pendidikan nonformal ini dapat diwujudkan dengan menghimpun masyarakat dengan asset-asetnya kemudian dikerucutkan dalam langkah strategis yang tujuannya adalah meminimalisir gejala yang terjadi pasca bencana, mengingat penyelesaian bencana lumpur lapindo ini belum menemui titik ujung, bahkan masih memunculkan problem-problem baru di masyarakat yang jauh lebih kritis.

Hal ini dapat diimplementasikan dengan menciptakan sebuah komunitas yang mampu dalam mengenali ancaman di wilayahnya, mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko bencana.

B. Fokus Masalah Pendampingan

Dalam berbagai kasus, korban bencana memang menjadi organ paling vital dan sensitif dalam merespon kondisi yang "berbeda" pasca terjadinya bencana. Seringkali mereka beranggapan bahwa ia sedang melayang di alam mimpi, ketika rumah-rumah, sekolah, kuburan kakek-neneknya tergenangi lautan pekat. Tidak jarang anak-anak menghadapi tekanan psikis, entah traumatik dalam mendengar atau melihat hal-hal tertentu atau merasakan ketakutan berlebih ketika menghadapi hal yang hampir mirip dengan yang terjadi.

Penanganan sosial lumpur lapindo memang tidak sesederhana pemberian ganti rugi belaka. Tidak sedikit justru dengan itu muncullah problematika baru di kalangan masyarakat korban lumpur lapindo yang lebih besar lagi pengaruhnya. Akan tetapi, membangun peradaban baru yang sesuai hendaknya menjadi hal yang harus dipikirkan. Bagaimana bersikap ketika sewaktu-waktu kondisi yang awalnya tenang seketika berubah drastis. Ada kenyataan yang sangat miris, ketika kondisi yang "berbeda" ini mengakibatkan beberapa anak dijual untuk dipekerjakan sebagai PSK di tretes Pasuruan. Umumnya mereka disuruh orang tua mereka untuk menambal uang penghidupan yang tidak semasyhur dahulu.

Pendidikan tanggap bencana, terutama melibatkan kelompok rentan dalam mengembangkan kemampuan "penyelamatan diri" sekaligus "pemulihan" pasca bencana bukanlah perkara yang mudah atau hal yang cukup dilakukan beberapa kali saja, melainkan perlu adanya tindakan continuing sehingga diharapkan bahwa masyarakat akan bergerak tanggap atas keadaannya yang darurat.

Kehadiran Yayasan Tanggul Bencana Indonesia di beberapa sekolah di wilayah terdampak lumpur lapindo beberapa waktu yang lalu merupakan sebuah gebrakan yang inspiratif bagi pengembang masyarakat dalam mengembangkan model pemberdayaan bagi masyarakat terdampak bencana. Pemulihan psikologis, pelatihan-pelatihan pada anak-anak terutama hingga penguatan kapasitas building melalui ORARI (Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia) sebagai alat komunikasi antar *local leader* menciptakan semangat baru meskipun hanya sementara dinikmati. Namun kegiatan tersebut kini mandek tanpa diketahui penyebabnya. Mengingat masyarakat terutama anak-anak masih membutuhkan model pemberdayaan semacam ini, terutama memberikan kesadaran bahwa bencana dan perubahan adalah siklus dari kehidupan manusia sehingga gejala akan mudah sekali diminimalisir.

Adapun fokus pendampingan yang dilakukan fasilitator dalam merespon problematika pasca bencana dapat di sistematiskan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana dampak luapan lumpur lapindo terhadap masyarakat Desa Ketapang terutama pasca relokasi sehingga memunculkan kerentanan?
2. Bagaimana strategi pendampingan tanggap bencana berbasis komunitas di desa Ketapang menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal?
3. Bagaimana solusi dalam mengembangkan pendampingan tanggap bencana berbasis masyarakat di desa Ketapang?

C. Tujuan Pendampingan

1. Menganalisis problematika di balik bencana lumpur lapindo pasca semburan dan pasca relokasi di Desa Ketapang.
2. Menganalisa langkah-langkah strategis dalam mengembangkan pengetahuan kebencanaan berbasis masyarakat melalui komunitas strategis.
3. Mengembangkan pendidikan tanggap bencana bersama masyarakat.

D. Pendekatan Pendampingan

Pendampingan dan penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Orientasi PRA adalah untuk memfasilitasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat dan kemampuan mereka untuk menangkap isu atau persoalan. Perhatian khusus dilakukan agar masyarakat lokal dapat melakukan analisi secara mandiri serta menyampaikan pengamatannya. Peran peneliti menjadi katalis, bukan sebagai ahli. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat lokal ditujukan untuk memberdayakan masyarakat sehingga PRA sejalan dengan konsepsi dasar tentang pembangunan berkelanjutan (pemberdayaan masyarakat lokal, persamaan, dan keadilan sosial).

Pada intinya *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah sekelompok pendekatan atau metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, serta membuat rencana dan tindakan nyata.

Metode tersebut dipandang telah memiliki teknis-teknis yang dijabarkan cukup operasional dengan konsep bahwa keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam seluruh kegiatan. Pendekatan *Participatory Rural Appraisal*

(PRA) memang bercita-cita menjadikan masyarakat menjadi peneliti, perencana, dan pelaksana pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Tekanan aspek penelitian bukan pada validitas data yang diperoleh, namun pada nilai praktis untuk pengembangan program itu sendiri. Penerapan pendekatan dan teknik PRA dapat memberi peluang yang lebih besar dan lebih terarah untuk melibatkan masyarakat. Selain itu melalui pendekatan PRA akan dapat dicapai kesesuaian dan ketepatangunaan program dengan kebutuhan masyarakat sehingga keberlanjutan (*sustainability*) program dapat terjamin.²

Konsep dasar pengurangan resiko bencana yang menjadi ikhtiar untuk mengurangi resiko bencana (*risk*) dengan memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity*) sehingga bisa mengurangi kerentanan (*vulnerability*) yang dimiliki dalam menghadapi bahaya (*hazard*) digambarkan dengan konsep kerentanan menjadi perhatian dan pendekatan penghidupan berkelanjutan. Kerentanan mencakup beberapa aspek yaitu *shock* (guncangan), musiman (*seasonality*), kecenderungan (*trends*), dan perubahan (*changes*). Dalam konteks lapangan, kajian atas resiko, bahaya, kerentanan dan kapasitas yang bertolak dari persamaan bencana relevan untuk secara spesifik untuk bidang penghidupan. Secara umum, teknik yang digunakan bertumpu pada teknik kajian pedesaan partisipatif (PRA) yang dikembangkan dengan perspektif kebencanaan menjadi kajian risiko bencana partisipatif.

² <http://www.ar.itb.ac.id/wdp/wp-content/uploads/2007/04/1-PRA-Indonesia.pdf>
(Akses upload : 23 Agustus 2014)

Untuk mendapatkan kinerja yang baik di dalam evaluasi pembangunan dengan menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, para praktisi dan fasilitator perlu mengikuti prinsip-prinsip dasar. Ada beberapa prinsip yang ditekankan dalam *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, antara lain:

1. Saling belajar dari kesalahan dan berbagi pengalaman dengan masyarakat.
2. Keterlibatan semua anggota kelompok, menghargai perbedaan, dan informal.
3. Orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku.
4. Konsep triangulasi
5. Optimalisasi hasil
6. Berorientasi praktis
7. Keberlanjutan program
8. Mengutamakan yang terabaikan
9. Pemberdayaan (Penguatan) masyarakat
10. Santai dan informal
11. Keterbukaan

Karena tujuan penerapan metode PRA adalah pengembangan program bersama masyarakat, penerapannya perlu senantiasa mengacu pada siklus pengembangan program. Gambaran umum siklus tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut³ :

³ <http://id.shvoong.com/humanities/1947728-participatory-rural-appraisal-pra/> (Akses Upload: 23 Agustus 2014)

- a. Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi, dengan maksud untuk menggali informasi tentang keberadaan lingkungan dan masyarakat secara umum.
- b. Perumusan masalah dan penetapan prioritas guna memperoleh rumusan atas dasar masalah dan potensi setempat.
- c. Identifikasi alternatif pemecahan masalah atau pengembangan gagasan guna membahas berbagai kemungkinan pemecahan masalah melalui urun rembug masyarakat.
- d. Pemilihan alternatif pemecahan yang paling tepat sesuai dengan kemampuan masyarakat dan sumber daya yang tersedia dalam kaitannya dengan swadaya.
- e. Perencanaan penerapan gagasan dengan pemecahan masalah tersebut secara konkrit agar implementasinya dapat secara mudah dipantau.
- f. Penyajian rencana kegiatan guna mendapatkan masukan untuk penyempurnaannya di tingkat yang lebih besar.
- g. Pelaksanaan dan pengorganisasian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan masyarakat.
- h. Pemantauan dan pengarahan kegiatan untuk melihat kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun.
- i. Evaluasi dan rencana tindak lanjut untuk melihat hasil sesuai yang diharapkan, masalah yang telah terpecahkan, munculnya masalah lanjutan, dll.

E. Sistematika Pelaporan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini merupakan bab yang mengawali tentang judul proposal skripsi yang diangkat oleh penulis: konteks problematik, fokus masalah pendampingan, tujuan pendampingan dan pendekatan pendampingan.

BAB II Deskripsi Lokal Desa Ketapang

Pada bab ini penulis memaparkan kondisi umum Desa Ketapang pra dan pasca semburan lumpur Lapindo. Sehingga diharapkan dalam menganalisa problem yang ada akan semakin mendalam dan terarah.

BAB III Analisa Problematik Desa Ketapang

Pada bab ini penulis memaparkan hasil *Focus Group Discussion* maupun hasil pengamatan secara subyektif dalam memahami persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Ketapang pasca semburan lumpur Lapindo dan pasca relokasi.

BAB IV Perencanaan Program Dan Aksi

Dalam bab ini berisi tentang menyadurkan konsep kebencanaan dalam konsep *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dalam menyusun langkah-langkah perencanaan hingga terimplementasikan dalam aksi bersama masyarakat

BAB V Analisa Reflektif

Di bab ini berisi tentang hasil perubahan yang muncul setelah pemberdayaan dilakukan. Analisa reflektif juga berisi tentang kajian hasil pendampingan dalam konsep kebencanaan, islam dan dakwah bil hal.

BAB VI Kesimpulan dan Penutup

Pada bab ini penulis memaparkan tentang pelajaran yang dapat dipetik dari proses pendampingan dan rekomendasi-rekomendasi yang dapat diajukan sebagai kajian keilmuan di kemudian hari.